

**KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA YANG DEMOKRATIS
TAHUN 2020**

(Studi Kasus di Desa Sawang Selatan Kecamatan Kundur Barat)

Oleh

Delvin Kurnia Sandi

NIM. 180565201030

Abstrak

Kondisi demografis Desa Sawang Selatan memiliki suku dan budaya yang beranekaragam, dengan keanekaragaman maka dari itu perlunya demokrasi dalam pelaksanaan pemerintahan desa. Salah satu tujuan demokrasi ialah untuk menciptakan kesejahteraan rakyat yang berasal dari rakyat itu sendiri. Namun dalam fenomena yang terjadi di masyarakat desa Sawang Selatan, BPD selaku perwakilan rakyat desa tidak mampu melaksanakan demokrasi desa yang maksimal dengan minimnya keterlibatan masyarakat dalam pembuatan kebijakan. Hal ini menyebabkan kebijakan yang diambil oleh BPD sering kali menimbulkan konflik di masyarakat maka dari itu perlunya diciptakan efisiensi, efektivitas, keadilan dan daya tanggap agar bisa menciptakan pemerintahan yang demokratis untuk dapat menjawab persoalan-persoalan di masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang demokratis tahun 2020 dengan menggunakan teori menurut Agus Dwiyanto. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan informan sebanyak 18 orang serta menggunakan teknik dan alat pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ditemukan bahwa dalam kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang demokratis tahun 2020 tidak berjalan maksimal, karena untuk melakukan menciptakan demokrasi perlunya efisiensi, efektivitas, keadilan, dan daya tanggap yang mampuni.

Kata Kunci: Kinerja Badan Permusyawaratan Desa, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Demokratis.

***PERFORMANCE OF THE VILLAGE CONSULTANCY BOARD (BPD) IN
THE IMPLEMENTATION OF A DEMOCRATIC VILLAGE GOVERNMENT
IN 2020
(Case Study in Sawang Selatan Village, Kundur Barat District)***

***By
Delvin Kurnia Sandi
NIM. 180565201030***

Abstract

The demographic condition of Sawang Selatan Village has diverse ethnicities and cultures, with diversity therefore the need for democracy in the implementation of village governance. One of the goals of democracy is to create people's welfare that comes from the people themselves. However, in the phenomenon that occurs in the Sawang Selatan village community, the BPD as the representative of the village people is not able to carry out maximum village democracy with the minimum involvement of the community in policy making. This causes the policies taken by the BPD to often cause conflict in the community, therefore it is necessary to create efficiency, effectiveness, justice and responsiveness in order to create a democratic government to be able to answer problems in the community. The purpose of this study was to determine the performance of the Village Consultative Body (BPD) in implementing democratic village governance in 2020 using the theory according to Agus Dwiyanto. The method used is descriptive qualitative with 18 informants and uses data collection techniques and tools in the form of observation, interviews and documentation. The results of the study found that the performance of the Village Consultative Body (BPD) in implementing democratic village government in 2020 did not run optimally, because to create democracy, efficiency, effectiveness, justice, and responsiveness were needed.

Keywords: Village Consultative Body Performance, Implementation of Village Government, Democratic.